OMBUDSMAN PAPUA BARAT DORONG PENGUATAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME PEGAWAI BPOM

Selasa, 24 November 2026 - papbar

MANOKWARI - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menekankan pentingnya ketangguhan psikologis, etika, dan profesionalisme aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan kapasitas pegawai yang diselenggarakan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari, Senin (23/11/2026).

Dalam pemaparannya, Amus menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas memerlukan aparatur yang memiliki kompetensi teknis, kematangan emosional, serta integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, ketangguhan psikologis diperlukan agar petugas mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan pekerjaan, dan merespons kebutuhan maupun keluhan masyarakat secara profesional.

"Pelayanan publik bukan hanya tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga bagaimana aparatur mampu mengendalikan diri, menjaga etika, dan menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat," ujar Amus.

Amus menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang adil, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Integritas aparatur harus tercermin melalui kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan tindakan dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

"Integritas harus tercermin dalam setiap tindakan aparatur. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang jelas, adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Karena itu, profesionalisme harus berjalan seiring dengan etika dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan," tambah Amus.

Dari perspektif pengawasan Ombudsman, Amus menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan penyelesaian layanan, tetapi juga oleh kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta perlakuan aparatur terhadap masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi, dan pengabaian kewajiban pelayanan berpotensi menimbulkan maladministrasi. Karena itu, penyelenggara pelayanan publik perlu memastikan penerapan standar pelayanan secara konsisten, meningkatkan responsivitas petugas, serta memperkuat mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kegiatan yang mengangkat subtema "Dari Kemampuan Melayani Menuju Pelayanan yang Berintegritas dan Dipercaya Masyarakat: Sinergitas Ketangguhan Psikologis dan Profesionalisme dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima" tersebut turut dihadiri Kepala Balai POM di Manokwari, Agustince Werimon, Komandan Satuan Tugas Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Papua Barat dan Papua Barat Daya beserta jajaran, serta pegawai Balai POM di Manokwari.

Melalui kegiatan ini, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat mendorong penguatan kapasitas dan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan ketangguhan psikologis, etika, dan profesionalisme diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi.

Amus menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik perlu dibangun melalui konsistensi aparatur dalam menerapkan standar pelayanan, menjaga integritas, dan bertanggung jawab terhadap setiap layanan yang diberikan. (OHEBG/ORI-Papbar)